

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

BAB I

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RISIKO KE DEPAN

1.1 Gambaran Umum Inflasi Triwulan I Tahun 2026

Perkembangan inflasi Kabupaten Bulungan/Kota Tanjung Selor selama Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tren inflasi tahunan (y-on-y) yang terus berada pada level cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada bulan Januari 2026, inflasi y-on-y tercatat sebesar 4,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,79. Inflasi kemudian meningkat menjadi 5,00 persen pada bulan Februari 2026 dengan IHK sebesar 108,39, sebelum akhirnya melandai menjadi 3,06 persen pada bulan Maret 2026 dengan IHK sebesar 108,83.

Secara bulanan (m-to-m), Tanjung Selor mengawali triwulan dengan deflasi sebesar -0,43 persen pada Januari 2026, kemudian berbalik menjadi inflasi sebesar 0,56 persen pada Februari 2026 dan 0,41 persen pada Maret 2026. Secara kumulatif, tingkat inflasi year to date (y-to-d) sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 0,53 persen.

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 yang didominasi oleh deflasi pada Januari dan Februari serta inflasi tinggi pada Maret akibat Ramadhan dan Idul Fitri, pola inflasi Triwulan I Tahun 2026 relatif berbeda karena didorong oleh faktor administered price (tarif listrik dan tarif air PAM) serta harga emas perhiasan, bukan semata-mata oleh gejolak harga pangan menjelang hari besar keagamaan.

1.2 Kelompok Pengeluaran Penyumbang Inflasi

Selama Triwulan I Tahun 2026, kelompok pengeluaran yang secara konsisten memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y terbesar setiap bulannya adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Januari 2026: kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga inflasi y-on-y 21,57 persen (andil 4,09 persen); kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya inflasi y-on-y 10,31 persen (andil 0,69 persen).
- Februari 2026: kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

inflasi y-on-y 22,88 persen (andil 4,31 persen); kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya inflasi y-on-y 11,94 persen (andil 0,81 persen).

- Maret 2026: kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga inflasi y-on-y 11,06 persen (andil 2,25 persen); kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya inflasi y-on-y 10,46 persen (andil 0,70 persen).

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y sepanjang Triwulan I Tahun 2026 antara lain tarif listrik, tarif air minum PAM, emas perhiasan, dan sewa rumah. Sementara itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami deflasi y-on-y pada Januari 2026 (-0,83 persen), namun berbalik menjadi inflasi pada Februari 2026 (0,90 persen) dan Maret 2026 (0,93 persen), seiring meningkatnya harga ikan bandeng/ikan bolu, daging ayam ras, beras, dan cabai rawit menjelang bulan Ramadhan.

Kelompok pengeluaran yang secara umum memberikan andil deflasi y-on-y sepanjang triwulan ini adalah kelompok Transportasi (terutama akibat penurunan tarif angkutan udara) serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

1.3 Komoditas Penyumbang Inflasi dan Deflasi

Komoditas yang secara dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y selama Triwulan I Tahun 2026 antara lain tarif listrik, tarif air minum PAM, emas perhiasan, sewa rumah, ikan bandeng/ikan bolu, daging ayam ras, beras, bakso siap santap, dan daging sapi. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y antara lain angkutan udara, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kangkung, bayam, tomat, sawi hijau, dan jagung manis.

Pola ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kabupaten Bulungan pada Triwulan I Tahun 2026 lebih banyak berasal dari harga yang diatur pemerintah (administered price) dan harga emas perhiasan yang mengikuti pergerakan harga global, sementara komoditas pangan bergejolak (volatile food) justru cenderung memberikan andil deflasi, meskipun tetap menunjukkan fluktuasi bulanan yang perlu terus diwaspadai, khususnya cabai rawit, bawang merah, dan ikan bandeng/ikan bolu yang silih berganti menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi m-to-m.

1.4 Risiko Inflasi ke Depan

Beberapa risiko inflasi di Kabupaten Bulungan yang perlu diwaspadai pada Triwulan II Tahun 2026 antara lain:

1. Potensi lanjutan penyesuaian tarif listrik dan tarif air minum PAM yang masih akan memberikan andil signifikan terhadap inflasi y-on-y apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi dan mitigasi yang memadai kepada masyarakat.
2. Fluktuasi harga emas perhiasan yang mengikuti pergerakan harga emas dunia, yang berkontribusi besar terhadap inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
3. Potensi kenaikan harga komoditas pangan bergejolak seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan ikan bandeng/ikan bolu menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada Triwulan II Tahun 2026.
4. Kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi yang berpotensi mengganggu produksi pertanian dan hasil tangkapan perikanan lokal, sehingga meningkatkan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Ketergantungan pasokan komoditas seperti bawang merah dan bawang putih yang tidak dapat diproduksi di Kabupaten Bulungan, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi antar daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

BAB II

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Bulungan pada Triwulan I Tahun 2026 bergeser dari yang sebelumnya didominasi oleh gejolak harga pangan, menjadi permasalahan yang lebih banyak bersumber dari kelompok administered price dan harga komoditas non-pangan, sebagai berikut:

- Penyesuaian tarif air minum PAM dan tarif listrik yang memberikan andil inflasi y-on-y sangat besar (masing-masing di atas 20 persen pada kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga), sehingga memerlukan komunikasi publik yang lebih intensif agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
- Kenaikan harga emas perhiasan yang bersifat eksternal dan mengikuti pergerakan harga emas dunia, sehingga sulit untuk dikendalikan langsung oleh Pemerintah Daerah namun tetap memberikan andil besar terhadap inflasi headline.
- Ketergantungan pasokan produk dari luar daerah untuk komoditas bawang merah dan bawang putih yang tidak dapat tumbuh dan diproduksi di Kabupaten Bulungan, sehingga harga kedua komoditas tersebut sangat rentan terhadap gangguan distribusi dan cuaca di daerah pemasok.
- Fluktuasi harga komoditas perikanan seperti ikan bandeng/ikan bolu yang silih berganti menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi setiap bulannya, mengindikasikan pasokan yang belum stabil akibat kondisi cuaca dan musim tangkap.
- Pendistribusian komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah yang belum sepenuhnya efektif dan efisien, sehingga berpotensi menjadi andil penyumbang inflasi yang cukup tinggi apabila terjadi gangguan pasokan menjelang Triwulan II Tahun 2026 (Ramadhan dan Idul Fitri).

Perlu disadari bahwa dalam penerapan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Bulungan tetap berupaya semaksimal mungkin mengintervensi kebijakan yang dianggap lamban penerapannya di lapangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bulungan, khususnya terkait harga yang diatur pemerintah (administered price) yang juga memberikan andil cukup besar terhadap inflasi Kabupaten Bulungan sepanjang Triwulan I Tahun 2026.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. High Level Meeting dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bulungan, termasuk membahas dampak penyesuaian tarif PDAM dan tarif listrik terhadap inflasi daerah.
 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan secara konsisten melakukan pemantauan stok dan harga bahan pokok penting serta jasa, dan melaporkan kepada Kementerian Perdagangan dan Bappenas.
 3. Koordinasi dengan PDAM dan PLN terkait jadwal dan besaran penyesuaian tarif agar dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat guna meminimalkan dampak psikologis terhadap ekspektasi inflasi.
 4. Tindakan oleh TPID dan Satgas Pangan terhadap harga yang tidak wajar, khususnya pada komoditas bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan daging ayam ras.
 5. Antisipasi lonjakan harga pangan menjelang Triwulan II Tahun 2026 (Ramadhan dan Idul Fitri) melalui koordinasi TPID dalam penambahan pasokan/supply dan pemantauan harga secara berkala.
 6. Konsisten mensosialisasikan belanja bijak kepada masyarakat sehingga tidak terjadi panic buying, khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional.
 7. Terkait pasokan/supply, dinas terkait melakukan penyediaan atau membuat kerja sama antar daerah, khususnya untuk komoditas yang tidak dapat diproduksi secara lokal.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

BAB IV

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

NO	KEBIJAKAN	EVALUASI
1.	Penyesuaian tarif dasar PDAM dan tarif listrik	Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengingat andil inflasi y-on-y dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat sangat tinggi (di atas 20 persen) sepanjang Triwulan I 2026, agar dampaknya terhadap daya beli masyarakat dapat diminimalkan.
2.	Melakukan gerakan pangan murah dan pasar murah	Komoditas yang dijual dan diberikan subsidi pada GPM dan Pasar Murah perlu terus dievaluasi agar tepat sasaran, khususnya menjelang lonjakan permintaan pada Triwulan II 2026 (Ramadhan dan Idul Fitri).
3.	Antisipasi lonjakan harga melalui penambahan pasokan/supply dan pemantauan harga, serta kerja sama antar daerah	Perlu memberikan kesempatan kepada BUMD untuk menjadi pemasok komoditas di Kabupaten Bulungan dan turut berkontribusi mendatangkan pasokan dari luar daerah, khususnya bawang merah dan bawang putih yang tidak dapat diproduksi secara lokal.
4.	Rapat teknis rutin tingkat daerah	Intensitas rapat teknis perlu ditingkatkan frekuensinya, khususnya dalam mengantisipasi dampak penyesuaian tarif administered price dan pergerakan harga emas perhiasan terhadap inflasi headline.
5.	Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.	

BAB V

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian inflasi Triwulan I Tahun 2026 dengan memperhatikan karakteristik inflasi Kabupaten Bulungan dan komoditas dominan terhadap angka inflasi pada Triwulan I Tahun 2026, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi secara masif dan bertahap terkait penyesuaian tarif air minum PAM dan tarif listrik, mengingat kedua komponen ini menjadi cost-push inflation dominan yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi y-on-y Kabupaten Bulungan sepanjang Triwulan I Tahun 2026.
2. Memantau secara berkala pergerakan harga komoditas pangan bergejolak, yaitu beras, daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ikan bandeng/ikan bolu, dan telur ayam ras, mengingat komoditas tersebut berpotensi kembali menjadi penyumbang inflasi menjelang Triwulan II Tahun 2026.

Melakukan intervensi harga dan penguatan stok menjelang Hari Besar Keagamaan

3. Nasional (Ramadhan dan Idul Fitri) pada Triwulan II Tahun 2026 sehingga inflasi bulanan dapat tetap terjaga.
4. Menjelang pancaroba atau pergantian musim, perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam mempersiapkan produksi pertanian dan hasil tangkapan perikanan lokal agar pasokan tetap stabil.
5. Bekerja sama dengan asosiasi pedagang, distributor, maupun agen komoditas pangan dalam menjaga ketersediaan barang, khususnya untuk komoditas yang bergantung pada pasokan luar daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dengan PLN dan PDAM terkait rencana penyesuaian tarif ke depan agar dapat dikomunikasikan lebih awal kepada TPID dan masyarakat.
7. Menyampaikan melalui platform media sosial terkait kegiatan pemerintah daerah dan program-program pengendalian inflasi kepada masyarakat secara berkala dan transparan.